



**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN KESADARAN KRITIS
PADA PNPM-MANDIRI PERKOTAAN
(Studi Kasus di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)**

Asma Luthfi*

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS Unnes Semarang, Jateng Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2013
Disetujui Juni 2013
Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:
access, control,
women, sharecroppers

Abstrak

Sifat pengembangan masyarakat adalah untuk establish kesadaran kritis masyarakat. Dalam proses pengembangan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan, kesadaran kritis diharapkan akan terbentuk melalui serangkaian siklus kegiatan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dalam deskriptif dan induktif. Studi ini menunjukkan bahwa proses pengembangan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat pada siklus dan kegiatan yang secara aktif melibatkan masyarakat dan partisipatif, kesadaran kritis yang terbentuk dari setiap siklus yang menekankan revitalisasi nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar masyarakat, dan berbagai peluang dan hambatan dalam pembentukan kesadaran kritis. Tapi kesadaran kritis dibentuk oleh PNPM-Mandiri Perkotaan masih paradigma fungsional dan modernis, karena hanya menekankan aspek manusia. Program pemberdayaan ini kurang menyentuh pada aspek struktural. Hal ini membuat proses pemberdayaan dalam PNPM-Mandiri Perkotaan belum mampu memecahkan masalah masyarakat secara komprehensif.

Abstract

The nature of community development is to establish critical consciousness of society. In the process of community development through the PNPM-Mandiri Perkotaan, critical consciousness is expected to be formed through a series of empowerment activity cycle. This study used a qualitative approach to analyze data in a descriptive and inductive. This study showed that the process of community development PNPM-Mandiri Perkotaan can be seen in the cycle and the activities that actively involve the community and participatory, critical consciousness which is formed from each cycle that emphasizes the revitalization of the universal values of humanity and the basic principles of community, and a variety of opportunities and barriers in the formation of critical consciousness. But the critical consciousness formed by the PNPM-Mandiri Perkotaan still a functional and modernist paradigm, because only emphasizes the human aspect. Empowerment programs are less touched on structural aspects. This makes the process of empowerment in PNPM-Mandiri Perkotaan has not been able to solve the problem of society as a comprehensive.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
email: asma.luthfi@gmail.com

PENDAHULUAN

Krisis multi dimensional yang melanda Bangsa Indonesia sejak beberapa dekade terakhir ini belum juga berakhir meski telah melewati berbagai rezim pemerintahan. Semua elemen bangsa telah merasakan dampak dari krisis multidimensi ini, terutama masyarakat yang berada pada level *grass root*. Akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan sarana umum masih sangat jauh dari realitas yang diidealkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya lonjakan pengangguran dan kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Jika krisis ini dibiarkan tanpa menemukan jalan keluar yang lebih arif, maka masalah sosial ini akan terus menjadi halangan bagi perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, berbagai strategi pembangunan digalakkan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan non pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Gagasan tentang pemberdayaan masyarakat muncul sejak terjadinya kegagalan pembangunan yang bersifat sentralistik dari negara. Dengan sifat yang sentralistik, dominasi negara menjadi sangat kuat sedangkan masyarakat diletakkan pada posisi yang marginal. Hal ini berimplikasi pada pembangunan yang berpola *top down* dan harus selalu beriringan dengan keinginan dan kepentingan pemerintah tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan yang sentralistik dan berpola *top down* ini tidak lepas dari paradigma pembangunan yang diusung oleh Orde

Baru saat itu yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan. Paradigma pembangunan (*developmentalism*) ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari teori modernisasi yang mengandaikan perubahan setiap negara bersifat linier. Kemajuan yang diidamkannya sesuai dengan kemajuan yang terjadi di negara-negara maju. Dengan paradigma ini, maka tujuan utama dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi negara, meski harus mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

Gagalnya paradigma pertumbuhan ekonomi yang dikemas dalam kebijakan *developmentalism* untuk mensejahterakan masyarakat mengakibatkan munculnya berbagai alternatif pembangunan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Dalam paradigma ini, pola *top down* digeser menjadi pola *bottom up* yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Paradigma ini dikenal dengan paradigma pembangunan manusia yang dilaksanakan secara sinergis dari berbagai *stake holder* yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Gagasan ini sesungguhnya merupakan gagasan pembangunan alternatif yang mencoba menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dari pihak swasta juga diharapkan memiliki kepedulian sosial lewat program-program yang mereka tawarkan. Program-program pemberdayaan masyarakat dari pihak swasta dikenal dengan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sedangkan dari pihak pemerintah diimplementasikan dalam berbagai sektor, baik di bawah tanggungjawab kementerian maupun yang langsung ditangani oleh masing-masing

BUMN lewat PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan berskala nasional adalah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) baik di tingkat perkotaan maupun perdesaan. Program ini sesungguhnya telah berjalan kurang lebih satu dekade dengan nama program yang berbeda, yakni P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Kedua program ini kemudian dilebur menjadi PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai pengganti P2KP dan PNPM-Mandiri Perdesaan sebagai pengganti PPK. Saat ini hampir seluruh kelurahan dan kecamatan di Indonesia telah terjangkau lewat PNPM-Mandiri ini. Beberapa capaian keberhasilan telah diperlihatkan dalam program ini, utamanya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tetapi dalam beberapa hal, program ini ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia secara maksimal. Dalam ranah yang lebih substansial, proses pemberdayaan dalam PNPM-Mandiri Perkotaan ini masih harus diuji dalam rangka mewujudkan hakikat dari pemberdayaan masyarakat yakni peningkatan kesadaran kritis masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih maksimal.

Tulisan ini akan membicarakan tentang Paradigma Pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan dan Implikasinya bagi Peningkatan Kesadaran Kritis Masyarakat di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Secara lebih khusus, tulisan ini akan menguraikan bagaimana proses pemberdayaan

masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran? bagaimana bentuk kesadaran kritis masyarakat setelah adanya PNPM-Mandiri Perkotaan?, dan bagaimana peluang dan hambatan dalam pembentukan kesadaran kritis tersebut?

Untuk menelaah kajian ini secara mendalam, maka terlebih dahulu perlu ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pembangunan alternatif. Pemberdayaan masyarakat adalah gagasan alternatif dalam pembangunan untuk mengatasi kebuntuan dari proses dan paradigma *developmentalism* yang selama ini diterapkan di Indonesia. Gagalnya paradigma *developmentalism* dalam memberikan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat, tidak lepas dari pola *top down* yang diterapkan sehingga program-program pembangunan yang dilakukan tidak pernah menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Pola *top down* dengan peran sentral negara dalam pembangunan pada kenyataannya tidak mampu mengatasi segala problem sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan sebaliknya, melanggengkan dominasi dan kekuasaan negara, dan segelintir orang dalam lingkaran birokrasi untuk berlaku secara manipulatif yang berkedok pembangunan. Akibatnya, kesenjangan sosial tampak jelas terlihat dan kemiskinan menjadi masalah kronis yang tidak kunjung bisa terselesaikan.

Pengalaman kegagalan pembangunan dengan paradigma modernisasi selama Orde Baru ini menjadi sebuah arti yang menjelaskan mengenai betapa pentingnya mengembangkan masyarakat yang berorientasi pada manusia. Pendekatan pembangunan dengan mengutamakan pada prinsip pemberdayaan harus menjadi agenda penting untuk masyarakat

dengan berbasis pada lokalitas dan pola *bottom up* (Suparjan, 2003:12-13). Untuk memahami dan melakukan kajian tentang pembangunan masyarakat dapat dirumuskan dalam empat asumsi yang dijadikan sebagai konsep dasar. Keempat konsep dasar tersebut adalah: (1) perkembangan atau pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, (2) perkembangan atau pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumber daya, dan peluang, (3) perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon berbagai persoalan yang berkembang, (4) perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi (Soetomo, 2009: 25).

Pada hakikatnya, konsep pembangunan masyarakat ini merupakan pembangunan alternatif (*alternative development*) yang digagas oleh John Friedman sebagai respon atas kegagalan pembangunan model pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep ini menuntut adanya demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin kepentingan rakyat banyak, kesamaan gender dan keadilan antar generasi. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan issue sentral dari konsep pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Selain itu, juga bermakna sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (Suparjan, 2003: 42-43)

Dalam berbagai literatur pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki pengertian dan

perspektif yang lebih luas. Andrew Pears dan Michael Stiefel mendefinisikannya sebagai pemberdayaan partisipatif yang memiliki bentuk-bentuk seperti menghormati kebhinnekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian. Sedangkan Samuel Paul menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dalam perspektif lingkungan, Borrini menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Priyono dan Pranarka dalam Suparjan, 2003:43). Dengan demikian, pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan bertumpu pada beberapa aspek yaitu (1) pemanfaatan jaringan sosial yang telah ada, (2) melihat kohesifitas masyarakat, dan (3) menentukan *primum mobile* yang akan menjadi *agent of change* pada diri manusia dan sekitarnya (Suparjan, 2003:43).

Hal senada juga diungkap oleh Tomatipasang (Tomatipasang dkk, 2007:30-44) bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan pembebasan umat manusia dari segala bentuk dominasi dan tirani yang menyebabkan terjadinya dehumanisasi. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan implementasi dari pendidikan kritis yang berpijak pada pemikiran dan paradigma yang secara ideologis melakukan kritik terhadap sistem dan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil atau dengan kata lain melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme dan mencita-

citakan perubahan sosial menuju masyarakat yang adil dan demokratis. Orientasi utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kesadaran kritis bagi masyarakat yang dengannya masyarakat mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis tentang proses kerja sistem dan struktur, serta bagaimana mentransformasikannya. Transformasi yang dimaksud adalah suatu proses penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Peningkatan kesadaran kritis merupakan bagian inti dan proses yang terpenting dalam pemberdayaan atau pengembangan masyarakat. Gagasan yang sederhana mengenai peningkatan kesadaran yaitu bahwa orang-orang menerima penindasan sebagai hal yang sedikit 'normal' atau 'tidak bisa dihindari'. Hal ini disebabkan oleh legitimasi dari struktur dan wacana yang menindas dan seringkali tidak akan mengakui dan menamai penindasan mereka sendiri sehingga pengalaman penindasan bersifat 'di bawah sadar'. Dengan demikian, dibutuhkan usaha untuk meningkatkan tingkat 'kesadaran' agar dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjelajahi situasi mereka dan struktur serta wacana yang menindas dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berbuat untuk menghasilkan perubahan (Ife dan Frank Tesoriero, 2008:345).

Untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran kritis, maka ada empat aspek yang harus dilakukan, yakni pertama, membuat koneksi antara pengalaman personal dan politik. Kedua, membangun hubungan dialogis yang mengutamakan pada pembelajaran yang timbal balik yang kolaboratif dan menghancurkan kekuasaan yang menjajah dan eksploitatif.

Ketiga, berbagi pengalaman penindasan dengan menyelidiki setiap pengalaman orang lain tentang apa pengertian dari penindasan, dan bagaimana orang-orang memahami dan mendefenisikannya, sehingga kesadaran kolektif dapat berkembang. Keempat, membuka peluang-peluang untuk tindakan sebab peningkatan kesadaran akan memberdayakan apabila ia membantu masyarakat tidak saja menempatkan pengalaman mereka sendiri dalam struktur dan wacana penindasan yang lebih luas, tetapi juga menggerakkan tindakan untuk perubahan (Ife dan Frank Tesoriero, 2008:346-349). Pada intinya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang realitas objektif.

Sebagai program pemerintah pada sektor pemberdayaan masyarakat, maka kesadaran kritis masyarakat yang dibentuk oleh PNPM-Mandiri Perkotaan dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Foucault tentang *governmentality*. Konsep ini berarti keabsahan 'pengaturan', 'intervensi', dan 'panduan' dari pihak yang dianggap mampu memberikan dan menyelamatkan kesejahteraan pada masyarakat yang dianggap tidak berdaya. *Governmentality* bekerja dengan menata keinginan dan membentuk kebiasaan, aspirasi dan kepercayaan, sehingga masyarakat yang diatur (*governed*) memandang cara ini sebagai "jalan yang benar untuk memperoleh tujuan dan memposisikan sesuatu" (Li, 2007: 6). Kerangka teoritik ini dapat dipergunakan untuk melihat bentuk keadaran kritis yang dikembangkan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan secara lebih substansial.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berdasar pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, maka hasil penelitian tidak sekedar berbasis pada angka-angka tetapi berupaya menjelaskan makna dari realitas yang terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Alasan dipilihnya Kelurahan Sekaran sebagai lokasi penelitian, karena program PNPM-Mandiri Perkotaan telah ada sejak tahun 2007 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pengamatan dan wawancara terhadap subjek penelitian yakni masyarakat Kelurahan Sekaran dan informan yang merupakan individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan penggalan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang relevan dengan fokus masalah. Selain itu, juga mempergunakan dokumen monografi Kelurahan Sekaran, dokumen fasilitator Kelurahan Sekaran, dan dokumen BKM Sekar Arum. Data primer didapatkan melalui metode observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka yang luas. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan yang secara administratif berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara geografis, letak Kelurahan Sekaran cukup strategis sebab diapit oleh 2 (dua) pusat pemerintahan Kabupaten/ Kota. Jarak Kelurahan Sekaran dengan Ungaran, ibukota Kabupaten Semarang adalah sekitar 9 km sedangkan dari Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah hanya berjarak 8 km. Adapun batas wilayah Kelurahan Sekaran adalah Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo, Kec. Gunungpati. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Patemon, Kec. Gunungpati. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalisegoro/Sadeng. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Sronol Wetan

Luas wilayah Kelurahan Sekaran adalah 490,718 Ha yang terdiri atas 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) dan 26 RT (Rukun Tetangga). Ketika masih berstatus sebagai bagian dari Kabupaten Semarang, wilayah ini terbagi atas 5 dusun yaitu Kampung Sekaran, Kampung Banaran, Bantar dowo, Bangkong, dan Persen. Namun seiring dengan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan, maka status administratif dusun digantikan oleh satuan administratif RW (Rukun Warga), yaitu: RW I terdiri dari 5 RT, RW II terdiri dari 3 RT, RW III terdiri dari 3 RT, RW IV terdiri dari 6 RT, RW V terdiri dari 5 RT, RW VI terdiri dari 2 RT, RW VII terdiri dari 2 RT

RW I, II, dan III merupakan bekas wilayah dusun Sekaran, RW IV dan V merupakan bekas wilayah dusun Banaran, RW VI merupakan

wilayah bekas dusun Persen. Sedangkan RW VII merupakan gabungan antara bekas wilayah dusun Bangkong dan Bantar dowo.

Secara topografis, Kelurahan Sekaran memiliki wilayah yang berbukit-bukit dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 75 mpdl. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka pemukiman masyarakat juga tersebar berdasarkan topografi tersebut. Sebagian masyarakat bertempat tinggal di lokasi yang tinggi, sebagian pula yang bertempat tinggal di lereng-lereng dan lembah perbukitan. Masyarakat yang berada di wilayah yang lebih tinggi relatif lebih dekat dengan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan pemerintahan sedangkan mereka yang bermukim di lereng dan lembah perbukitan memiliki akses yang relatif lebih jauh dari fasilitas publik tersebut. Kampung Banaran dan Sekaran adalah dua dari seluruh kampung di Kelurahan Sekaran yang relatif lebih dekat fasilitas publik dan relatif lebih banyak mendapat pengaruh dari luar akibat pembauran dengan warga pendatang. Tiga kampung lainnya yakni Persen, Bangkong dan Bantar dowo adalah kampung yang berada di lereng dan lembah perbukitan dengan akses jalan yang terjal. Dengan kondisi demikian, maka kondisi mereka lebih jauh dari akses publik dan kontak dengan masyarakat pendatang.

Kegiatan pemberdayaan dalam PNPM-Mandiri Perkotaan yang telah dan akan dilaksanakan di Kelurahan Sekaran meliputi semua kampung tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan, maka Kampung Persen, Bangkong, dan Bantar dowo merupakan kantong-kantong kemiskinan di Kelurahan Sekaran. Wilayah ini yang banyak mendapatkan

kegiatan pemberdayaan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan. Meski demikian, Kampung Sekaran dan Banaran yang dianggap relatif lebih maju, juga tidak luput dari perhatian PNPM-Mandiri Perkotaan dalam kegiatan pemberdayaannya, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran

Keterlibatan Dibukanya Sejak tahun 2007, Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan program PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum. Sebelum berlabel PNPM-Mandiri Perkotaan, program ini dahulu bernama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada proses-proses pemberdayaan masyarakat. Alasan utama diselenggarakannya P2KP adalah kondisi kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, sementara program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada masih bersifat parsial, sektoral dan tidak menyentuh pada akar penyebab kemiskinan. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia semakin kronis. Peralihan nama dari P2KP ke PNPM-Mandiri Perkotaan tidak mengubah substansi program, bahkan substansi tersebut justru diperdalam dan diperkuat dalam PNPM-Mandiri Perkotaan.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-Mandiri Perkotaan dilakukan secara terpadu, baik pada aspek manusia, komunitas, maupun pada lingkungannya. Semua pendekatan dalam PNPM-Mandiri Perkotaan tersebut diorientasikan untuk mendorong terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan melembaganya pembangunan berkelanjutan. Dengan berbasis pada modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka diharapkan akan terbentuk kesadaran kritis menuju transformasi sosial.

PNPM-Mandiri Perkotaan memiliki motto “ Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan”. Dengan motto tersebut, maka PNPM-Mandiri Perkotaan melihat bahwa kemiskinan dan ketidaksejahteraan yang terjadi di masyarakat akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya, utamanya para pemimpinnya. Kondisi ini membawa implikasi bahwa pemimpin yang belum berdaya tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, cara yang harus dilakukan adalah memberdayakan mereka melalui perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat, utamanya para pemimpinnya untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan.

Secara substansial, maka pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dilandasi oleh nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip universal. Nilai-nilai universal yang melandasi pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai gerakan moral yang ingin dikampanyekan dalam kegiatan pemberdayaannya yang meliputi: nilai-nilai

kejujuran, dapat dipercaya, ikhlas yang diaplikasikan dalam bentuk kerelawanan, adil, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman. Sementara itu, prinsip-prinsip universal kemasyarakatan yang melandasinya dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* yang meliputi: demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, dan desentralisasi. Untuk melangkapi landasan dasarnya, maka pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan juga menerapkan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan yang meliputi: perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan pengembangan ekonomi.

Berdasarkan pada paradigma tersebut, maka proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran dapat dilihat pada siklus program dan bentuk kegiatannya sebagai berikut:

Siklus Kegiatan Pemberdayaan

Sebagai program pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada revitalisasi modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka PNPM-Mandiri Perkotaan berupaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar kemiskinan dapat terentaskan dengan potensi, kekuatan, dan kemandirian masyarakat. Untuk itulah, maka kegiatan program PNPM-Mandiri Perkotaan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan didampingi oleh fasilitator di tingkat kelurahan dengan melalui beberapa siklus. Siklus kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan meliputi Sosialisasi awal, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM), Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM)/Renta Pronangkis, dan Pengorganisasian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Untuk Kelurahan Sekaran, pelaksanaan siklus ini telah 2 (dua) kali dilakukan sebab telah melalui dua kali periode. Periode pertama dilakukan dalam jangka 3 (tiga) tahun yakni tahun 2007 sampai awal tahun 2010, sedangkan untuk periode kedua dimulai pada akhir tahun 2010. Pada periode kedua, semua siklus dijalani kembali kecuali sosialisasi awal dan RKM (Rebug Kesiapan Masyarakat). Anggota LKM atau BKM dipilih kembali dengan personalia yang baru. Tetapi apabila masyarakat masih menginginkan personalia anggota BKM lama untuk menjabat kembali, maka hal ini pun tidak dipermasalahkan. Kondisi ini terjadi di BKM Sekar Arum Kelurahan Sekaran yang masih mengangkat Bapak Sutiyo untuk menjabat kembali sebagai koordinator BKM Sekar Arum. Meski demikian, ada pula pergantian di tingkat anggota BKM Sekar Arum. Setelah anggota BKM terbentuk, masyarakat kemudian mengajukan kembali rancangan kegiatan yang baru melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mereka bentuk.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan istilah tridaya. Program kegiatan tridaya tersebut telah dilakukan di Kelurahan Sekaran sejak tahun 2007 silam, yakni tahun pertama PNPM-Mandiri Perkotaan dan dilanjutkan pada tahun kedua sejak pertengahan tahun 2010.

Berdasarkan siklus kegiatan di atas, maka semua bentuk kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sekaran sesuai dengan PJM (Perencanaan Jangka Menengah) yang dirumuskan oleh BKM Sekar Arum. Dalam perumusan PJM ini, BKM berdasar pada data hasil diskusi masyarakat melalui Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya. Pada periode pertama yakni 2007-2009, BKM Sekar Arum mendapatkan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi tiga tahap pencairan. Pada pencairan tahap pertama, alokasinya terbagi atas tiga bagian, yakni 70% untuk kegiatan lingkungan, 20% untuk kegiatan ekonomi, dan 10% untuk kegiatan sosial. Untuk periode kedua, BKM Sekar Arum mendapatkan dana BLM sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bentuk-bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran antara lain:

Aspek Lingkungan/Infrastruktur

Kegiatan lingkungan pada tahun pertama yang dilakukan di Kelurahan Sekaran diantaranya berupa pembuatan paving jalan yang dimaksudkan untuk perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Pembuatan paving jalan ini dilakukan di RW 1 dengan volume perbaikan jalan (paving jalan) sebesar 165 m². Pada periode kedua PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran, kegiatan lingkungan yang telah dilaksanakan adalah pembuatan talud (drainase) badan jalan sepanjang 36,5m² di wilayah yang dianggap sebagai kantong kemiskinan. Kegiatan lingkungan lain yang baru akan dilaksanakan di

Kelurahan Sekaran pada periode kedua ini adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan masuk Kampung Bangkong dan Kampung Bantar Dowo yang terletak di RT 01 RW 07.

Aspek Sosial

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh BKM Sekar Arum antara lain adalah: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan plesterisasi rumah bagi warga miskin. Masyarakat yang melaksanakan setiap kegiatan sosial ini dibawah naungan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kegiatan sosial yang lain adalah plesterisasi rumah warga miskin. Kegiatan ini dilakukan di kantong-kantong kemiskinan, yakni di Kampung Persen dan Bangkong. Khusus di Persen (RW 6), plesterisasi rumah warga miskin ini diperuntukkan bagi 4 (empat) rumah, salah satunya adalah rumah milik mbah Srinah, 80 tahun. Rumah Mbah Srinah masih berlantai tanah, sementara beliau sudah tua, sakit-sakitan, dan tinggal sendirian di rumah tersebut. Semua tahap kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam KSM Griya Sekar. Sedangkan pada periode kedua ini, kegiatan sosial yang baru mulai berjalan adalah Kambing Gadoh, yakni pemberian induk kambing ke warga kurang mampu untuk ditenakkan.

Aspek Ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan sistem pembayaran berangsur dan tanggung renteng.

Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha produktif. Oleh karena itu, jika ada warga masyarakat yang ingin menerima suntikan modal, maka diharuskan membentuk kelompok terlebih dahulu, yang disebut dengan istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bidang ekonomi. Satu KSM terdiri atas minimal 5 (lima) orang. Dalam KSM ini, masyarakat diajarkan untuk membuat proposal pengajuan dana dan diajarkan pula bekerja secara tim (kelompok) sebab apabila satu orang mengalami kemacetan pembayaran, maka akan ditanggulangi oleh anggota kelompok yang lain. Di Kelurahan Sekaran, bantuan permodalan tersebut diberikan ke beberapa KSM, salah satunya adalah KSM Sekar Arum 6. Kelompok ini terdiri atas 9 (Sembilan) orang yang masing-masing mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 500.000,-. Jika usaha mereka berhasil dan mengalami kemajuan, maka mereka bisa mengajukan kembali dana pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan catatan apabila uang kas BKM masih ada.

Bentuk Kesadaran Kritis Masyarakat melalui Kegiatan Pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan

Serangkaian kegiatan pembelajaran dalam siklus kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan yang telah diselenggarakan di Kelurahan Sekaran sejak awal 2007 silam, merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat Sekaran. Kesadaran kritis yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman masyarakat terhadap resiko, tanggungjawab, hak dan kewajiban yang timbul dari segala konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Dengan kata lain, melalui siklus

pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan tersebut masyarakat Sekaran dapat memahami apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana kegiatan tersebut di laksanakan di lingkungan mereka. Menurut Pak Sutiyo, Koordinator BKM Sekar Arum, kesadaran kritis ini adalah sebuah proses agar masyarakat tahu, *ngerti*, dan mampu memecahkan masalah sendiri agar kemiskinan dapat tertanggulangi di wilayahnya.

Hal ini seperti yang tertera dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan (2010: 6-7) yakni sebagai berikut:

“ Dalam hal ini, PNPM meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera... (cetak tebal dari penulis).

Jika dikaitkan dengan asumsi dasar dan paradigma PNPM-Mandiri Perkotaan di atas, maka kesadaran kritis yang ingin ditumbuhkembangkan adalah kesadaran kritis yang terkait dengan revitalisasi atau penguatan kembali nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti jujur, ikhlas, dan dapat dipercaya. Selain itu untuk menguatkan kembali prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan seperti demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kesadaran kritis dalam proses pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan berorientasi pada pengembalian fitrah manusia yang telah mengalami dehumanisasi. Hanya saja, paradigma

tentang dehumanisasi ini agak berbeda Paulo Freire yang melihat penyebab dehumanisasi karena adanya ketidakadilan struktural. Dehumanisasi dalam paradigma PNPM-Mandiri Perkotaan disebabkan karena kondisi kultural masyarakat. Persepektif kultural dalam melihat terjadinya dehumanisasi ini, berimplikasi pada bentuk kesadaran kritis yang ingin ditumbuhkembangkan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan yang tidak menekankan pada perlawanan dan resistensi masyarakat atas dominasi, penindasan dan ketidakadilan struktural yang mereka alami tetapi pada pemulihan kembali keadaan masyarakat yang telah kehilangan nilai-nilai dasarnya. Secara paradigmatis, bentuk kesadaran kritis yang dikembangkan PNPM-Mandiri Perkotaan masih bersifat fungsionalis karena masih melanggengkan struktur yang ada dan telah mapan di masyarakat.

Dengan paradigma kesadaran kritis yang fungsionalis tersebut, PNPM-Mandiri Perkotaan menumbuhkembangkannya melalui tahapan siklus kegiatannya. Siklus ini merupakan proses pembelajaran masyarakat tingkat kelurahan. Pada Kelurahan Sekaran, proses pembelajaran tersebut dilakukan dalam bentuk rembug warga, FGD (*Focus Group Discussion*), tinjauan lingkungan, dan review (evaluasi) program. Bentuk kesadaran kritis pada masing-masing siklus tersebut antara lain:

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Rembug Kesiapan Warga (RKM)

Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak berdiskusi tentang seluk beluk program PNPM-Mandiri Perkotaan sekaligus menentukan diterima atau tidaknya program PNPM-Mandiri Perkotaan di wilayah mereka. Proses kesadaran kritis yang muncul di sini adalah keputusan warga

dalam penerimaan atau penolakan program diputuskan secara bersama dan partisipatif.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Refleksi Kemiskinan (RK)

Kegiatan refleksi kemiskinan ini dilakukan di Kelurahan Sekaran dalam dua tahap, yakni diskusi terbatas (FGD) dengan warga di masing-masing RT dan dilanjutkan dengan diskusi di tingkat kelurahan. Kesadaran kritis yang terbentuk dari kegiatan ini adalah pengetahuan masyarakat Sekaran akan penyebab utama kemiskinan yang mereka hadapi dan kesadaran warga untuk menanggulangnya secara bersama. Selain itu mereka juga merumuskan sendiri kriteria warga miskin menurut mereka. Hanya saja, proses diskusi yang dilakukan di kelurahan Sekaran hanya melibatkan perwakilan masyarakat saja di setiap RT.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Pemetaan Swadaya (PS)

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi-potensi yang ada di masyarakat melalui diskusi secara intensif dengan warga dalam beberapa kali pertemuan. Proses ini dilakukan dengan mengaplikasikan metodologi PRA (*Participatory Rural Appraisal*) pada kegiatan diskusinya. Dengan langkah-langkah PRA ini, maka Masyarakat Sekaran diajarkan untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mengenali potensi yang mereka miliki. Kesadaran kritis yang dibentuk dalam proses ini adalah Masyarakat Sekaran secara aktif mendiskusikan potensi yang mereka miliki untuk dijadikan landasan bagi perencanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Dalam rangkaian siklus PNPM-Mandiri Perkotaan, pembentukan BKM merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam hal pengorganisasian diri. Bentuk kesadaran kritis dari kegiatan ini adalah pemahaman masyarakat mengenai kolektifitas dalam penanggulangan kemiskinan, baik dari masyarakat miskin, maupun dari masyarakat yang berkecukupan. Selain itu, partisipasi, demokratisasi dan transparansi dalam proses pemilihan anggota BKM Sekar Arum merupakan perwujudan dari kesadaran kritis masyarakat.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Penyusunan PJM

Program Jangka Menengah (PJM) merupakan hasil dari perencanaan partisipatif. Kesadaran kritis yang terbentuk dalam tahap ini adalah pembelajaran di tingkat masyarakat dalam membuat sebuah program perencanaan yang partisipatif. Selain itu pada tingkat yang lebih substansial adalah memulihkannya kembali nilai-nilai dasar kemanusiaan pada anggota BKM sebab mereka mampu meminggirkan egoisme kewilayahan dengan menentukan prioritas kegiatan pada kantong kemiskinan dalam skala kelurahan.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Pengorganisasian KSM.

Dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) merupakan kelompok penerima manfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Berdasarkan

pada aspek pembangunan tridaya di PNPM-Mandiri Perkotaan, maka KSM yang dibentuk oleh masyarakat juga terbagi atas 3 (tiga) jenis, yakni KSM Lingkungan, KSM Sosial, dan KSM Ekonomi. Proses pemberian dana stimulan dari BLM untuk KSM ini baru akan cair jika mereka membuat proposal berdasarkan kebutuhan riil mereka. Oleh karena itu, bentuk kesadaran kritis dalam kegiatan ini adalah pembelajaran masyarakat dalam menentukan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mereka butuhkan serta dalam mengorganisasikan diri mereka.

Bentuk Kesadaran Kritis pada Tahap Tinjauan Partisipatif.

Tinjauan partisipatif merupakan tahap evaluasi dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan yang dilakukan setiap tahun dengan istilah RWT (Rebug Warga Tahunan). Tahap Evaluasi ini meliputi 3 (tiga) bentuk yakni tinjauan kelembagaan, tinjauan keuangan, dan tinjauan program. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana PNPM-Mandiri Perkotaan dapat secara efektif memberdayakan masyarakat dan sekaligus menanggulangi kemiskinan. Dalam proses evaluasi ini, masyarakat terlibat secara penuh untuk melihat kinerja BKM Sekar Arum, penggunaan keuangan dalam pengalokasian BLM, dan efektifitas kegiatan yang telah terlaksana. Dengan demikian, kesadaran kritis yang terbentuk pada tahap ini adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan oto-kritik terhadap upaya pemberdayaan yang telah mereka lakukan.

Kesadaran kritis masyarakat Kelurahan Sekaran dapat dilihat dalam beberapa perwujudan berikut ini:

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat
2. Penguatan Kelembagaan Lokal
3. Terjadinya Transformasi Sosial pada Masyarakat.

Peluang dan Hambatan dalam Pembentukan Kesadaran Kritis Masyarakat Sekaran

Sebagai program pemerintah yang berskala nasional, PNPM-Mandiri Perkotaan yang ada di Kelurahan Sekaran tidak lepas dari dinamika, baik dari sisi PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai program, maupun dari sisi masyarakat Sekaran yang menjadi sasaran pemberdayaan. Karena pembentukan kesadaran kritis merupakan sebuah proses yang tidak bersifat *instan*, maka cara mengukur keberhasilannya pun tidak gampang untuk dilihat secara cepat dan langsung. Hal ini karena kesadaran kritis menyangkut struktur berfikir dan sisi esoteris manusia. Oleh karena itu, kesadaran kritis ini hanya dilihat pada aspek perwujudannya saja berupa aktifitas dan perilaku masyarakat Sekaran yang mencerminkan sisi kesadaran kritis yang dibangun oleh PNPM-Mandiri Perkotaan. Dalam hal ini, maka ada banyak problematika yang menyertai proses pembentukan kesadaran kritis tersebut, yakni berupa peluang dan hambatan yang dihadapinya, antara lain sebagai berikut:

Peluang

Dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan, maka peluang atau potensi yang dimiliki baik diri sisi kelembagaan maupun dari sisi masyarakat, antara lain:

- a. Masyarakat yang masih *guyub*

- b. Proses Pembelajaran Masyarakat yang intensif
- c. Pemahaman Pemberdayaan Anggota BKM Sekar Arum yang Cukup Tinggi

Hambatan

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat PNPM-Mandiri Perkotaan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat dalam setiap kegiatannya tidak luput dari berbagai masalah dan hambatan, antara lain:

- a. Paradigma yang terlalu idealis, fungsional, dan meng-*general*-kan persoalan masyarakat.
- b. Antara orientasi proyek dengan orientasi pemberdayaan
- c. Pelibatan masyarakat kurang merata dalam setiap kegiatan.
- d. Asumsi Masyarakat tentang PNPM-Mandiri Perkotaan

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa paradigma kesadaran kritis yang dikembangkan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan beserta aktualisasinya di masyarakat, lebih bertumpu pada penguatan atau revitalisasi nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan. Kesadaran kritis yang ingin ditumbuhkembangannya didasarkan atas pandangan bahwa nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar telah luntur dan mengalami degradasi. Masyarakat sudah mulai individualistik dan mulai kehilangan rasa empati dan solidaritasnya yang mengakibatkan kemiskinan dan ketidakberdayaan pada masyarakat kecil dan marginal. Dengan kondisi

demikian, maka usaha-usaha pemberdayaan mutlak dilakukan dengan jalan menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat melalui penguatan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan. Pada intinya, bentuk kesadaran kritis yang diimplementasikan melalui siklus kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan sangat bersifat fungsionalis dan berparadigma modernis sehingga menekankan pada aspek masyarakat sebagai agen. Unit analisisnya tentang kesadaran kritis dan transformasi sosial tidak pernah menyentuh pada aspek struktural, misalnya pada ketidakadilan struktural yang menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi masyarakat. Untuk itulah, maka dalam implementasinya, pembangunan masyarakat dengan paradigma ini, hanya melihat pada sisi internal manusia dan menolak faktor eksternal seperti struktur dan sistem ekonomi.

Jika dianalisis dengan menggunakan konsep Foucault tentang *governmentality*, maka dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan masih sarat dengan watak teknokratis. Hal ini dapat dilihat dalam pandangannya ketika memandang akar kemiskinan pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang di-*generalisir* pada semua konteks masyarakat meskipun tantangan dan kondisi sosial mereka berbeda. Selain itu, partisipasi yang senantiasa didorong sebagai salah satu wujud kesadaran kritis tidaklah digali dari pengalaman sosial, budaya, dan politik masyarakat secara massip dan substansial sehingga partisipasi tersebut cenderung hanya bermakna sebagai keikutsertaan masyarakat terhadap program dan kegiatan, bukan pada pembenahan dan pemberdayaan masyarakat

secara struktural. Watak *technocratic governmentality* ini juga dapat dilihat pada konsep transformasi sosial yang diusung oleh PNPM-Mandiri Perkotaan. Dalam hal ini, transformasi sosial diartikan sebagai perubahan kualitas masyarakat dari tidak berdaya menuju masyarakat yang berdaya, mandiri, dan madani. Bentuk-bentuk masyarakat tersebut merupakan hasil pemberdayaan yang dilakukannya dengan kriteria-kriteria tertentu. Konsep ini mengingatkan kita dengan konsep Rostow tentang pertumbuhan negara yang harus dilalui dalam beberapa tahapan. Jika demikian, maka sesungguhnya transformasi masyarakat yang diharapkan belum murni dari aspirasi masyarakat sendiri, tetapi masih ada campur tangan negara melalui program PNPM-Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu, maka transformasi sosial yang akan dibentuknya tidak diorientasikan pada terbentuknya struktur masyarakat yang baru dan lebih adil, melainkan bentuk-bentuk kemandirian masyarakat yang masih berwatak modernis.

Hal ini mengakibatkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan belum mampu memecahkan persoalan masyarakat secara komprehensif, sebab hanya menangani masyarakat pada level mikro, yakni unsur personal mereka. Dengan hanya menekankan pada level mikro, maka sumber masalah utama belum tersentuh. Untuk itulah, maka pemberdayaan masyarakat semestinya harus pula menyentuh pada level makro yakni pada kondisi sistem dan struktur sosialnya, agar masyarakat betul-betul terberdayakan, baik pada level mikro maupun pada level makro.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesadaran kritis merupakan inti dari proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat akan mampu bertransformasi ke arah yang lebih baik apabila masyarakat sadar akan masalah dan potensi yang mereka miliki sehingga mampu merumuskan solusi untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Dalam PNPM-Mandiri Perkotaan, kesadaran kritis ini dibentuk melalui proses pemberdayaan yang dikenal dengan siklus kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan. Bentuk Kesadaran kritis tersebut terwujud dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam setiap siklusnya, penguatan kelembagaan lokal, dan upaya mewujudkan transformasi sosial. Dalam menumbuhkembangkan kesadaran kritis ini, PNPM-Mandiri Perkotaan memiliki peluang dan hambatan. Peluangnya adalah kondisi masyarakat yang masih guyub, proses pembelajaran masyarakat yang intensif, dan pemahaman pemberdayaan anggota BKM Sekar Arum. Sedangkan hambatan yang dialami adalah Paradigma PNPM-Mandiri Perkotaan yang dirasakan terlalu idealis, masih terikatnya program pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai proyek pemerintah, sosialisasi yang kurang massif, dan asumsi yang terbangun di masyarakat terhadap PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai proyek pemerintah yang harus dihabiskan dananya.

Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diberikan saran kepada pengelola program PNPM-Mandiri Perkotaan agar lebih massif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai

program pemberdayaan ini. Selain itu yang lebih substansial adalah kesadaran kritis masyarakat tidak hanya dapat dilihat secara fungsional, tetapi juga secara struktural, sehingga proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak sekedar menyalahkan atau mengemangkan potensi masyarakat tetapi masyarakat diajak untuk melihat secara kritis kondisi dan relasi struktural yang tidak seimbang, yang juga menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Chambers, Robert. 1997. *PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Handayani, Triaskti dan Sugiarti, 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and The Practice of Politics*, Durham: Duke University Press.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Topatimasang, Roem dkk. 2007. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Insist Press.